

JURNAL

Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan

Media Analisis Masalah Pelayaran dan Kepelabuhanan

Pengembangan Pembelajaran Ekspor Berbasis Internet
Ekka Pujo Ariesanto Akhmad

Optimisasi Pengisian Muatan Ke Dalam Peti Kemas
Ekka Pujo Ariesanto Akhmad

Agency Theory Dalam Perspektif Syariah (Kajian Tentang Penerapan Teori Keagenan Pada Bank Syariah dan UMKM Dalam Pembiayaan Murabahah Wal Wakalah)
Anton Respati Pamungkas

Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Benny Agus Setiono

Pengaruh Ketepatan Penempatan Jabatan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai
Enni Sustiyatik

Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja TKBM di Divisi Terminal Mirah PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya
M. Taufik



JURNAL 
Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan
Media Analisis Masalah Pelayaran dan Kepelabuhanan

Susunan Dewan Redaksi

Pemimpin Umum

Pudji Santoso

Ketua Penyunting

Benny Agus Setiono

Wakil Ketua Penyunting

Ekka Pujo Ariesanto Akhmad

Anggota Penyunting

Ari Srientini

Kuncowati

M. Taufik

Mudiyanto

Mitra Bebestari

Sugeng Priyanto (Distrik Navigasi)

Sofyan Poli (BJTI)

Monika Retno Gunarti (BP2IP)

Hardjono (TPS)

Kesekretariatan: Soendari, Didik Purwiyanto

Distribusi: I Made Dwinanto R., Makdin Sijabat

Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan diterbitkan sejak 1 September 2010 oleh Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan diterbitkan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun pada bulan Maret dan bulan September. Redaksi menerima artikel ilmiah asli dalam bidang ilmu pelayaran dan kepelabuhanan.

Alamat Redaksi:

Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah

Jalan Arief Rahman Hakim 150

Surabaya 60111

Telepon (031) 5964596 | Fax. (031) 5964596, (031) 5946261

e-mail: jurnal_pdp@yahoo.co.id

JURNAL 
Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan
Media Analisis Masalah Pelayaran dan Kepelabuhanan

Daftar Isi

	Halaman
Pengembangan Pembelajaran Ekspor Berbasis Internet Ekka Pujo Ariesanto Akhmad	1-18
Optimisasi Pengisian Muatan Ke Dalam Peti Kemas Ekka Pujo Ariesanto Akhmad	19-34
Agency Theory Dalam Perspektif Syariah (Kajian Tentang Penerapan Teori Keagenan Pada Bank Syariah dan UMKM Dalam Pembiayaan Murabahah Wai Wakalah) Anton Respati Pamungkas	35-47
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan Benny Agus Setiono	48-73
Pengaruh Ketepatan Penempatan Jabatan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Enni Sustiyatik	74-83
Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja TKBM di Divisi Terminal Mirah PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya M. Taufik	84-100

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEMISKINAN

(Government Policy in Addressing Poverty)

Benny Agus Setiono
Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Program Diploma Pelayaran,
Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstrak: Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya, dan politik. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan pemberdayaan ekonomi, akan tetapi juga dengan pemberdayaan politik bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial seperti yang dikehendaki. Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah ada sejak jaman pra reformasi, sampai masa reformasi saat ini. Ini merupakan masalah yang signifikan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kita pada saat ini. Begitu banyak upaya pemerintah dalam membuat berbagai kebijakn demi mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, akan tetapi, kemiskinan masih saja belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Jika kita menelaah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sebenarnya kebijakan tersebut dapat menangani kemiskinan yang ada di negara kita sekarang, jadi siapakah yang salah dalam hal ini? Pemerintahkah? Pejabat negarakah?, atau masyarakat? Hal ini memang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua terutama pada pengamat-pengamat ekonomi di Indonesia. Jadi, atas dasar statement-statement di atas itulah penulis berusaha mengkaji berbagai persoalan yang mengenai penanganan kemiskinan di negara Indonesia. Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah kemiskinan. Penyebab kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia dimana pendapatan yang didapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang disebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kurang memiliki ketrampilan yang memadai.

Kata kunci: Kemiskinan di Indonesia

***Abstract:** Overcoming poverty is essentially an effort to empower poor people to be independent, both in terms of economy, culture, and politics. Poverty reduction not only with economic empowerment, but also to the political empowerment of the poor layer is something that can not be inevitable if economic equality and the realization of public welfare with social justice as desired. Poverty is a phenomenon that has existed since the pre-reform era, until the current reform. This is a significant problem being faced by our government at the moment. So much effort the policy of the government in making a variety of issues in order to overcome poverty, however, poverty still can not be solved entirely by the government. If we examine the policies that have been established by the government in poverty alleviation efforts, the policy actually can handle poverty that exist in our country right now, so who is wrong in this? Whether the Government? Whether the Country?, or public officials? It is indeed a big question for all of us, especially on economic observers in Indonesia. So, on the basis of statements above that the author tries to study various issues regarding the handling of poverty in the country of Indonesia. One obstacle is the economic development is poverty. Causes of poverty in Indonesia is the lack of available jobs, jobs that are not balanced by the number of inhabitants. Unequal distribution of incomes of the population Indonesia where income earned can not meet their daily needs, while there are some people in Indonesia have excess income. This is called unequal incomes of the population in Indonesia. Low levels of public education and the lack of adequate skills.*

Keywords: Poverty in Indonesia

Alamat korespondensi:

Benny A. S., Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Jalan A. R. Hakim 150, Surabaya. e-mail: jurnal_pdp@yahoo.co.id

Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memang memiliki banyak isu dan permasalahan terkait

sosial dan ekonomi yang perlu diamati lebih lanjut. Salah satunya adalah kemiskinan. Perdebatan terjadi ketika teori, konsep, serta pengaplikasian

untuk menanggulangi kemiskinan dirasa hanya berpengaruh sedikit dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Alhasil hanya menjadi alat menghambur-hambur biaya dengan hasil yang dirasa minim. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi untuk terus maju mengingat letak geografisnya yang menunjang tersedianya kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, potensi bahari yang besar, serta keanekaragaman hayati yang hanya bisa dibandingkan oleh beberapa negara saja.

Optimisme muncul dengan banyaknya kekayaan yang Indonesia miliki sebagai sebuah jembatan dari jawaban pengentasan kemiskinan seperti dengan membuka lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan, dll. Namun kini muncul sebuah fenomena dimana kemiskinan bukan hanya sebuah keadaan tentang ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak seorang manusia untuk sejahtera. Sebenarnya Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk membuat semua rakyatnya mampu merasakan kekayaan negara ini. Hal tersebut terpampang di dalam batang tubuh pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menguasai seluruh kekayaan alam untuk dipergunakan sepenuhnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, kemiskinan merupakan sebuah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai sumber yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendidikan masyarakat, pendapatan, pengangguran, geo-grafis, karakter, budaya, dan lainnya. Tidak hanya di desa, di kota pun fenomena kemiskinan bisa dengan mudah ditemukan.

Selanjutnya masalah kemiskinan merupakan isu sentral di Tanah Air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP, dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, menurut INDEF tahun 2009 yang memproyeksikan jumlah penduduk miskin mencapai 40 juta (16,8%) sedangkan data BPS pada Maret 2008 menyatakan bahwa penduduk miskin sebanyak 35 juta jiwa (15,4%). Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tahun 2006, mencapai 60 juta jiwa dari total penduduk atau sekitar 25 persen. Dengan asumsi pendapatan per bulan hanya Rp150 ribu per bulan. Padahal standar Bank Dunia orang miskin memiliki pendapatan US\$2 per kapita per hari. Maka jika standar ini digunakan maka jumlah keluarga miskin di Indonesia lebih fantastik lagi. Kemiskinan sebuah kondisi kekurangan yang dialami seseorang atau suatu keluarga. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi sampai saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi sampai saat ini belum ditemukan strategi yang

tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan merumuskan kebijakan anti kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Ketidakberhasilan itu kiranya bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi semata-mata. Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan pemberdayaan ekonomi, akan tetapi juga dengan pemberdayaan politik bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial seperti yang dikehendaki.

Kemiskinan merupakan fenomena yang sudah ada sejak jaman pra reformasi, sampai masa reformasi saat ini. Ini merupakan masalah yang signifikan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kita pada saat ini. Begitu banyak upaya pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan demi mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, akan tetapi, kemiskinan masih saja belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Jika kita menelaah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sebenarnya kebijakan tersebut dapat menangani kemiskinan yang ada di negara kita sekarang, jadi siapakah yang salah dalam hal ini? Pemerintahkah? Pejabat negarakah?, atau masyarakat? Hal ini memang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua terutama pada pengamat-pengamat ekonomi di Indonesia. Jadi, atas dasar statement-statement di atas itulah penulis berusaha mengkaji berbagai persoalan yang mengenai

penanganan kemiskinan di negara Indonesia. Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah kemiskinan. Ia merupakan tolak ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang tengah berlangsung dapat dinikmati oleh segenap warga negaranya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain, pembangunan yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat. Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan akibat dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal ini, kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah :

- a. Bagaimana pengertian kemiskinan?
- b. Bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia saat ini ?
- c. Program apa yang dilaksanakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ?
- d. Apa penyebab kemiskinan di Indonesia ?
- e. Bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan ?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Untuk mendeskripsikan pengertian kemiskinan.
- b. Untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini.
- c. Untuk mendeskripsikan program yang dilaksanakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

d. Untuk mendeskripsikan penyebab kemiskinan di Indonesia.

e. Untuk mendeskripsikan cara mengatasi masalah kemiskinan.

PEMBAHASAN

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Secara umum kemiskinan lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana

seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki. Parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan adalah lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hal ini, seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari per kapita.

Selain dengan pendekatan asupan kalori, kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang dan hal-hal yang dikemukakan di atas. Dari sini, dapat kita katakan bahwa dalam menentukan

kemiskinan terdapat variabel pokok yang tidak bisa dilupakan yakni yang terkenal dengan istilah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua yakni, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Adapun komponen dari masing-masing indikator adalah GKM lebih berbasis pada pendekatan pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita.

Sedangkan komponen GKBM adalah seperti pendidikan, kesehatan dan papan. Selama Maret 2006 - Maret 2007, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,67 persen, yaitu dari Rp.151.997,- per kapita per bulan pada Maret 2006 menjadi Rp.166.697,- per kapita per bulan pada Maret 2007. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2006, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,08 persen, tetapi pada bulan Maret 2007, peranannya hanya turun sedikit menjadi 74,38 persen. Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2007, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan sebesar 28,64 persen di perdesaan dan 18,56 persen di perkotaan. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (2,99 persen di perdesaan, 2,23 persen di perkotaan), telur (1,11 persen di perdesaan, 1,58 persen di perkotaan), mie instan (1,58 persen di perdesaan, 1,70 persen di perkotaan) dan minyak goreng (1,34 persen di perdesaan, 0,90 persen di perkotaan). Untuk komoditi

bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan yaitu 6,04 persen di perdesaan dan 7,82 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 2,90 persen, 2,78 persen dan 2,50 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta orang (16,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin pada Maret 2007 masih lebih tinggi dibandingkan keadaan Februari 2005, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,97 persen. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2006 - Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,20 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,93 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,13 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2007 persentase ini hampir sama yaitu 63,52 persen.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Tiga dimensi (aspek atau segi) kemiskinan, yaitu:

Pertama, kemiskinan multidimensi artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinanpun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset-asset, organisasi politik dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek yang sekunder yang berupa miskin jaringan sosial, dan sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sehat dan perawatan kesehatan yang kurang baik serta pendidikan yang juga kurang baik. Kedua, aspek kemiskinan tadi saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar perkataan kemiskinan pedesaan (rural poverty) dan sebagainya, namun ini bukan desa atau kota, an sich yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk atau juga manusianya yang menderita miskin jadi miskin adalah orang-orangnya penduduk atau manusianya.

Adapun ciri-ciri kemiskinan pada umumnya adalah; Pertama, pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal, ataupun keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas. Kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Ketiga, tingkat pendidikan rendah waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan. Keempat, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Kelima, mereka yang hidup di kota masih

berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai.

Indikator-indikator Kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut.

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di

bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari, dengan batasan ini, maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari \$2/hari. "Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Dampak Kemiskinan Terhadap Masyarakat

Banyak dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kesejahteraan masyarakat sangat jauh dan sangat rendah Ini berarti dengan adanya tingkat kemiskian yang

tinggi banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

2. Tingkat kematian meningkat, ini dimaksudkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang mengalami kematian akibat kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang di alami.

3. Banyak penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuhan akan makanan yang mereka makan sehari-hari.

4. Tidak bersekolah (tingkat pendidikan yang rendah) ini menyebabkan masyarakat di Indonesia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pendapatan.

5. Tingkat kejahatan meningkat, Masyarakat Indonesia jadi terdesak untuk memperoleh pendapatan dengan cara-cara kejahatan karena dengan cara yang baik mereka tidak mempunyai modal yaitu ilmu dan keterampilan yang cukup.

Kemiskinan Ditinjau Dari Aspek Sosial dan Aspek Politik

Adapun kemiskinan yang dilihat dari aspek sosial, yaitu: **Kemiskinan**, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh. **Keterlantaran**, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5)

lansia terlantar. *Kecacatan*, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2) cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis. *Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku*, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjustment) secara normatif, seperti: (1) tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkoba, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar. *Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk*, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil. *Korban Bencana Alam dan Sosial*, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya. *Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi*, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power), dalam pengertian ini mencangkup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan

sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan Sumber Daya, sehingga masyarakat miskin biasanya adalah yang jauh dari pusat kekuasaan karena kekuasaan adalah tangan baja untuk mengeruk Sumber Daya yang tersedia. Dilihat dari aspek politik ini ada pula kaitannya dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya posisi untuk menuntut hak.

Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini

Menurut Sadono Sukirno (1996:33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen.

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksudnya tetap sama. Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55).

Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan

sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002:5) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Prof. Meier (dalam Adisasmita, 2005:205) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Sadono Sukirno (1985:13), mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-

barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sementara itu pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000:57), adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Dengan bahasa lain, Boediono (1999:8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Jadi, dengan bukan bermaksud 'menggurui', pertumbuhan

ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi atau hasil pada saat itu.

Boediono (1999:1-2) menyebutkan secara lebih lanjut bahwa Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "output per kapita". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output per kapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan Pembangunan Manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk *Beyond scarcity; power, poverty dan the global water*. Laporan ini menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja.

Jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah satu periode (2000-2005). Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta, yaitu dari 34,01 juta (17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun 1999. Kembali cerah ketika periode 1999-2002, penduduk miskin menurun 9,57 juta yaitu dari 47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta (18,20%).

Keadaan ini terulang ketika periode berikutnya (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan presentasi menurun dari 18,20% menjadi 15,97 %. Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin bertambah dari 35,10 juta (15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (1,78%). Adapun laporan terakhir, Badan Pusat Statistika (BPS) yang telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007, angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp 152.847 per-kapita per bulan.

Bangsa Indonesia perlu mewaspadaai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis. Hal itu dilontarkan anggota Kaukus Ekonomi Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta, saat dihubungi Kompas, Kamis (3/1/2013). Menurut Arif, hal itu ditunjukkan oleh semakin meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang meningkat hampir dua kali lipat selama tahun 2012. "Badan Pusat Statistik mencatat, indeks keparahan pada Maret 2012 sebesar 0,36. Padahal, pada September 2012 menjadi 0,61. Kenaikan indeks ini menunjukkan dua hal, yaitu semakin melebar kesenjangan antarpenduduk miskin dan, juga, semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar

Rp259.520 per bulan," paparnya. Kondisi penduduk miskin di wilayah pedesaan yang semakin parah ini, tambah Arif, diakibatkan karena tingginya tingkat inflasi wilayah pedesaan, yakni 5,08 persen, jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 4,3 persen selama tahun 2012. Inflasi di pedesaan yang tinggi disumbangkan oleh kenaikan harga-harga bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, dan kesehatan. Sementara, di sisi lain, kenaikan upah yang diterima buruh tani ataupun buruh hanya antara 1 persen dan 3 persen dalam tahun 2012. Tidak seimbang antara kenaikan upah yang diterima dan kenaikan harga kebutuhan dasar tersebut menjadi salah satu penyebab keadaan kemiskinan di Indonesia tak berubah banyak dari waktu-ke waktu. Pencapaian swasembada pangan yang diprioritaskan untuk wilayah pedesaan adalah kata kunci yang harus dilakukan segera. Pemerintah harus memberikan prioritas yang lebih kepada petani, terutama dengan melalui program intensifikasi yang bersifat menyeluruh dan tak partikularif. Ini harus dimulai dari pengembangan riset dan teknologi yang berbasis pertanian pangan, pengembangan infrastruktur pertanian, insentif kepada petani, sampai dengan program industrialisasi perdesaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia atas dasar berlaku meningkat dari IDR 1.975,5 triliun pada kuartal I 2012 menjadi IDR 2.146,4 triliun di kuartal I 2013.

Sejalan dengan Produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, PDB atas harga konstan 2000 juga mengalami peningkatan dari kuartal I 2012 sebesar IDR 633,2 triliun menjadi IDR 662,0 triliun pada kuartal I 2013. Namun, sebagaimana telah diperkirakan oleh GAMA LEI, acuan yang dihasilkan Macroeconomic Dashboard untuk memprediksi

keadaan ekonomi Indonesia di masa mendatang, laju pertumbuhan ekonomi kuartal I 2013 hanya mencapai 6,02%, lebih rendah dibandingkan dari periode yang sama tahun 2012 yang tercatat sebesar 6,29% ataupun dibandingkan dengan kuartal IV 2012 yang mencapai 6,1%. Ini sudah kedua kalinya GAMA LEI mampu memprediksi secara tepat mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. Padahal saat itu pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan menguat. Bank Indonesia bahkan memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh 6,2% pada kuartal I 2013 karena ditopang investasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Selain itu, GAMA LEI juga berhasil mematahkan prediksi Asian Development Bank yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2013 akan membaik dan tumbuh mencapai 6,4%. Kenyataannya, perekonomian Indonesia di kuartal I 2013 justru lebih rendah dari perkiraan para analis, sesuai dengan hasil penelitian GAMA LEI bahwa perekonomian Indonesia di awal tahun 2013 lebih buruk dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2013 didorong oleh hampir semua sektor kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar -0,43% (YoY). Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi secara year on year pada kuartal I 2013 adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi (9,98%), diikuti sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan (8,35%), dan sektor Konstruksi (7,19%). Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2013 bersumber dari permintaan domestik yang menurun dan ekspor yang lemah. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh melambat sejalan dengan menurunnya daya beli akibat inflasi

bahan makanan dan meningkatnya ekspektasi inflasi terkait dengan ketidakpastian kebijakan subsidi bahan bakar minyak.

Sementara Konsumsi Pemerintah tumbuh rendah di awal tahun karena masih terbatasnya serapan belanja, khususnya belanja barang. Di sisi lain, investasi cenderung melambat karena prospek permintaan domestik dan internasional yang lemah. Selain itu, investor diperkirakan mulai bersikap “wait and see” sejalan dengan mendekatnya Pemilu. Dengan melambatnya pertumbuhan investasi dan konsumsi, maka impor mengalami kontraksi. Secara year on year, sepanjang kuartal I 2013 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,17%, Konsumsi Pemerintah 0,42%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,90%, Ekspor 3,39%, dan Impor 0,44%. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2013. Salah satunya adalah mendorong percepatan penyerapan anggaran pemerintah yang selama ini masih hanya berkontribusi tipis terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah harus mampu menjaga consumer confidence dari masyarakat dengan menjaga daya beli masyarakat disertai inflasi yang rendah. Pemerintah juga perlu fokus dalam revitalisasi infrastruktur untuk meningkatkan investasi. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan karena investasi tidak semata-mata hanya berkaitan dengan masalah insentif namun juga berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, kelembagaan yang mendukung, serta kondisi makro ekonomi yang baik. Meskipun pertumbuhan ekonomi melamban, tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga Februari 2013 mencapai 5,92% atau turun dibandingkan TPT Agustus

2012 yang tercatat sebesar 6,14%. Begitu juga bila dibandingkan dengan TPT Februari 2012 yang tercatat mencapai 6,32%. Penurunan tersebut sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 440 ribu orang, dari 7,61 juta orang pada Februari 2012 menjadi 7,17 juta pada Februari 2013. Apalagi jumlah penduduk setengah menganggur meningkat, tercatat sebesar 12,77 juta orang pada Agustus 2012 menjadi 13,56 juta orang pada Februari 2013. Dari sisi jumlah angkatan kerja, sepanjang Februari 2012 hingga Februari 2013 tercatat peningkatan angkatan kerja di Indonesia sebesar 780 ribu orang, dimana pada Februari 2012 angkatan kerja tercatat sebesar 120,41 juta sedangkan di bulan Februari 2013 jumlahnya naik menjadi 121,19 juta orang. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, dalam satu tahun terakhir (Februari 2012 hingga Februari 2013) terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,45%. Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2013 belum ada perubahan yang signifikan, penyerapan tenaga kerja terbesar masih dikontribusikan dari sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa Kemasyarakatan, dan sektor Industri. Jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2012, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2013 mengalami kenaikan terutama di sektor Perdagangan, tercatat naik sebesar 790 ribu orang (tumbuh sebesar 3,29%). Serupa dengan kondisi sektor Perdagangan, jumlah penduduk yang bekerja di sektor Konstruksi pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan Februari tahun sebelumnya, tumbuh sebesar 12,95%. Penduduk yang bekerja di sektor Industri juga meningkat, dari 14,21 juta orang pada Februari 2012 menjadi 14,78 juta orang pada Februari 2013, atau tumbuh sebesar 4,01%. Sedangkan sektor-sektor yang

mengalami penurunan pada Februari 2013 adalah sektor Pertanian dan sektor lainnya yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 3,01% dan 5,73% dibandingkan Februari 2012.

Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia, jumlah penduduk miskin turut berkurang. Berdasarkan data terbaru dari BPS, penduduk miskin di Indonesia pada September 2012 sebanyak 28,59 juta orang (11,66%), turun dibandingkan pada Februari 2012 yang mencapai 36,1 juta orang (16,66%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2012, maka selama satu semester berikutnya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,54 juta orang. Namun demikian, perlu diingat bahwa garis kemiskinan yang dipakai pada September 2012 sebesar IDR 259.520 per kapita per bulan, naik sebesar 4,35% dibandingkan Maret 2012, jika dicermati secara kritis tidak mengindikasikan penduduk miskin berkurang. Sebagai ilustrasi, berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar IDR 259.520 per bulan, berarti satu keluarga yang memiliki satu orang anak dengan penghasilan tunggal sebesar IDR 800.000 per bulan sudah tidak dikatakan miskin. Padahal, jelas terlihat bahwa kehidupan keluarga tersebut tentu sangat tidak layak.

Program Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.

5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Dari lima fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang dilakukan pemerintah terkait lima program tersebut dengan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti, penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton dan stabilisasi/kepastian harga komoditas primer. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

1. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.

2. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

3. Pelatihan budaya, motivasi usaha, dan teknis manajemen usaha mikro.

4. Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.

5. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro.

6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
7. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.
8. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
9. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.
10. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.
2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
3. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.
4. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain:

1. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);

2. Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
3. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
4. Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang dibuat oleh pemerintah seperti,

- a. Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
- b. Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi, dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

Berikut ini adalah program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.

2. Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Tetap mempertahankan program lama seperti:
 - a. BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
 - b. RASKIN (Beras Miskin).
 - c. BLT (Bantuan Langsung Tunai).
 - d. Asuransi Miskin, dsb.
4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp5000,- per Kg)
5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
7. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah.
8. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.
9. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin.
10. Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list.
11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan harus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness.
12. PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementerian/lembaga.
13. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan.
14. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber

permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.

15. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.

16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

17. Percepatan pembangunan infrastruktur.

18. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

19. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan.

20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik.

21. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

Ada beberapa program yang perlu dilakukan agar kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi.

1. Meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa mungkin pendidikan harus terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya sekolah yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan hanya fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi.

2. Pembagian tanah/lahan pertanian untuk petani. Paling tidak separuh rakyat (sekitar 100 juta penduduk) Indonesia masih hidup di bidang pertanian. Menurut Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar. Bahkan ada yang tidak punya tanah dan sekedar jadi buruh tani. Kadang terjadi tawuran antar desa hingga jatuh korban jiwa hanya karena memperebutkan lahan beberapa hektar!

3. Tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat dari para pengusaha besar. Para petani/ pekebun kecil sulit untuk mengeksport produk mereka. Sebaliknya para pengusaha besar dengan mudah mengeksport produk mereka (para pengusaha bisa menekan/melobi pemerintah), sehingga rakyat justru bisa kekurangan makanan atau harus membayar tinggi sama dengan harga Internasional. Ini sudah terbukti dengan melonjaknya harga minyak kelapa hingga 2 kali lipat lebih dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan akibat kenaikan harga Internasional. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa.

4. Melakukan efisiensi di bidang pertanian. Perlu dikaji apakah pertanian kita efisien atau tidak. Jika pestisida kimia mahal dan berbahaya bagi kesehatan, pertimbangkan predator alami seperti burung hantu untuk memakan tikus, dsb. Begitu pula jika pupuk kimia mahal dan berbahaya, coba pupuk organik seperti pupuk hijau/kompos. Semakin murah biaya pestisida dan pupuk, para petani akan semakin terbantu karena ongkos tani semakin rendah.

5. Mendata produk-produk yang masih kita impor. Kemudian teliti produk mana yang bisa dikembangkan di dalam negeri, sehingga kita tidak tergantung dengan impor sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai contoh jika mobil bisa kita produksi sendiri, maka itu akan sangat menghemat devisa dan membuka lapangan kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor terjual di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp 200 triliun/tahun. Jika pemerintah menyisihkan 1% saja dari APBN yang Rp1.000 triliun/tahun untuk membuat/mendukung BUMN yang menciptakan kendaraan nasional, maka akan terbuka lapangan kerja dan penghematan devisa milyaran dollar setiap tahunnya.

6. Stop eksploitasi atau pengurasan kekayaan alam oleh perusahaan asing. Kelola sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh asing dengan alasan kita tidak mampu dan sedang transfer teknologi. Kenyataannya dari tahun 1900 hingga saat ini ketika minyak hampir habis kita masih "transfer teknologi".

Penyebab Kemiskinan di Indonesia

Penyebab kemiskinan di Indonesia sampai saat ini Masih Belum Bisa Teratasi Sepenuhnya. Maka jelaslah, kenapa hingga kini masalah kemiskinan belum juga dapat ditekan hingga pada titik yang terendah. Karena masalah kemiskinan ternyata merupakan masalah yang kompleks dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam setiap sisi kehidupan. Karenanya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tapi hingga kini faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sepertinya pemerintah harus lebih jeli lagi dalam memahami masalah kemiskinan. Karena selama ini, banyak kebijakan yang ditetapkan pemerintah justru malah membebani rakyat dan secara langsung bukan malah memerangi kemiskinan, tapi malah menjadikan rakyat semakin miskin. Seperti kebijakan pemerintah untuk menetapkan berbagai pajak kepada rakyat yang kini dirasa semakin membebani rakyat.

Karena kita ketahui, banyak hasil pajak yang dipungut dari rakyat tapi penggunaannya melenceng dari yang diharapkan. Pajak bukan lagi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi banyaknya pungutan pajak, malah sering digunakan sebagai ajang korupsi bagi para pejabat kita di pemerintahan. Kekeliruan lain dari kebijakan pemerintah adalah dengan

menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada pihak swasta (asing) dengan alasan demi efisiensi, kelancaran dan persaingan yang kompetitif dalam mekanisme pasar. Dengan kebijakan tersebut, sesungguhnya telah menjadi boomerang bagi negara sendiri. Karena otomatis perusahaan-perusahaan asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freeport dan yang lainnya bebas mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Akibatnya, bukan pemasukan negara yang bertambah, tetapi pemasukan asing yang bertambah. Sedang pemasukan negara tidak juga bertambah (malah berkurang).

Dalam kondisi yang seperti ini, tampak jelas bahwa pemerintah sesungguhnya telah gagal dalam melindungi aset-aset/kekayaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, agar sepenuhnya tetap berada dalam kekuasaan/ kepemilikan negara. Kalau setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tidak juga memikirkan dampak buruknya terhadap tingkat kesejahteraan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan para pengusaha dengan tujuan mencari laba (keuntungan pihak-pihak tertentu saja), rasanya kemiskinan akan sulit untuk dituntaskan. Karena dampak dari kekeliruan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah imbasnya justru telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian masyarakat bawah yang selalu saja menjadi objek penderita yang harus menerima segala kegagalan. Sehingga upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kini tak ubahnya seperti sebuah pertarungan antara hidup dan kematian.

Kemiskinan sesungguhnya dapat disebabkan oleh keterbatasan kesempatan sebagian besar rakyat Indonesia untuk mengakses sumber daya yang sebenarnya dapat berfungsi untuk menghasilkan income

(pendapatan), seperti keterbatasan modal dan asset untuk usaha dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan di negara kita juga disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan kualitas SDM, tentu kita dapat melihat bagaimana kondisi dunia pendidikan kita. Apakah usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan dan memajukan dunia pendidikan di negara kita sudah benar-benar terwujud? Seperti kebijakan sertifikasi guru yang telah ditetapkan pemerintah. Karena nyatanya hingga kini banyak guru yang mengajar di sekolah (baik SD, SMP maupun SMU) kualitas keilmuannya masih sangat memprihatinkan. Meskipun para guru telah mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan profesi guru. Lalu, bagaimana kualitas SDM Indonesia akan meningkat, kalau SDM (tingkat keilmuan) gurunya saja masih rendah. Tentu kondisi ini lagi-lagi akan menjadi kendala pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Padahal pendidikan merupakan modal terpenting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Maka tak salah kalau akhirnya Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa posisi kualitas SDM Indonesia sangatlah rendah.

Penyebab kemiskinan lain adalah budaya atau etos kerja rakyat Indonesia yang kini sudah terdegradasi oleh pengaruh perkembangan zaman. Kini, semangat untuk terus bekerja (melakukan apa saja) yang penting bisa menghasilkan uang (penghasilan) dengan cara yang halal demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga telah beralih pada etos kerja yang menghalalkan segala macam cara. Dan kini, budaya atau etos kerja itu telah

mengalami penurunan dan beralih menjadi budaya malas yang tahunnya hanya “meminta-minta saja”. Makanya kini tidak heran kalau para pengemis, pengamen dan anak-anak jalanan kian menjamur di kota-kota besar dan merupakan suatu bukti bagaimana pola pikir masyarakat kita yang telah terdegradasi.

Maraknya tindakan korupsi di berbagai lembaga pemerintahan kita juga merupakan penyebab lain, mengapa tingkat kemiskinan belum juga dapat ditekan. Karena miliaran hingga triliunan uang negara yang telah diselewengkan oleh berbagai pejabat di pemerintahan kita telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Di satu sisi negara ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengucurkan berbagai aliran dana kepada rakyat miskin. Tetapi di sisi lain, ternyata banyak aliran dana yang malah diselewengkan oleh pejabat-pejabat kita di pemerintahan hanya untuk kepentingan (memperkaya diri sendiri). Seharusnya dana yang diselewengkan oleh para koruptor tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian di negara kita, termasuk membantu rakyat miskin.

Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif dalam melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut. Persoalan real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan individual dalam bentuk kondisi dari kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural sehingga dapat menghalanginya untuk memperoleh peruntungan untuk dapat memajukan hidupnya. Kelompok yang masuk dalam golongan yang tidak beruntung, yaitu kemiskinan fisik yang lemah, kerentaan, keterisolasian, dan ketidakberdayaan.

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan

pekerjaan yang tersedia di Indonesia, Seperti kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan di Indonesia

1. Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia.
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumnya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan yang memadai, sehingga dapat memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dapat ditanggulangi.
3. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per kapita secara global. Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita :

1. Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
2. Politik ekonomi yang tidak sehat.
3. Faktor-faktor luar negeri, diantaranya rusaknya syarat-syarat perdagangan, beban hutang, kurangnya bantuan luar negeri, dan perang.
4. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal.
5. Biaya kehidupan yang tinggi, melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.
6. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata, hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
7. Kurangnya perhatian dari pemerintah, masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi masalah negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah akan masalah ini mungkin menjadi salah satu penyebabnya.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab sub-budaya (sub kultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Cara Mengatasi Masalah Kemiskinan

Strategi pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha. Menurut Lincoln Arsyad (2000) ada 4 strategi pembangunan ekonomi daerah, yaitu

1. Strategi pengembangan fisik (locality or physical development strategy)
Tujuan strategi ini adalah untuk menciptakan identitas daerah kota,

memperbaiki pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapainya maka diperlukan alat-alat pendukung yaitu Pembuatan bank tanah, Pengendalian perencanaan dan pembangunan, Penataan kota, Pengaturan tata ruang, Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik, dan Penyediaan infrastruktur.

2. Strategi pengembangan dunia usaha (business development strategy)
Ini merupakan komponen yang penting karena daya tarik kreativitas atau daya tarik dunia usaha adalah cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat.

3. Strategi pengembangan sumber daya manusia (human resource development strategy)

Ini merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pelatihan, membuat bank keahlian, mendukung lembaga ketrampilan dan pendidikan di daerah, dan mengembangkan lembaga pelatihan bagi orang cacat.

4. Strategi pengembangan masyarakat (community-based development strategy)

Merupakan kegiatan untuk memberdayakan suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat sosial.

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Selanjutnya kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat

dikategorikan menjadi dua yaitu kebijaksanaan :

1. Kebijakan tidak langsung

Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksudkan antara lain adalah suasana sosial politik yang tenteram, ekonomi yang stabil, dan budaya yang berkembang. Upaya penggolongan ekonomi makro yang berhati-hati melalui kebijakan keuangan dan perpajakan merupakan bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan. Pengendalian tingkat inflasi diarahkan pada penciptaan situasi yang kondusif bagi upaya penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dengan harga yang terjangkau oleh penduduk miskin.

2. Kebijakan langsung

Kebijakan langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta dan produktifitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberikan peluang bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat memberikan pendapatan yang memadai. Dalam hubungan ini, pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat diprioritaskan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa-desa miskin berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung

sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha.

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut.

1. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih, dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah

dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.

3. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Berikut ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia. Propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.

Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.

Masalah kemiskinan yang mewabah dikalangan masyarakat untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat

ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah

1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.

2. Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat.

3. Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.

4. Menggalakkan program zakat. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dalam Islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti : Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer.

6. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain: Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA); Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi; Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.

7. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan., Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus dan Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warganegara.

2. Kondisi ekonomi di Indonesia saat ini adalah tingginya tingkat inflasi wilayah pedesaan, yakni 5,08 persen, jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 4,3 persen selama tahun 2012. Inflasi di pedesaan yang tinggi disumbangkan oleh kenaikan harga-harga bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, dan kesehatan. Sementara, di sisi lain, kenaikan upah yang diterima buruh tani ataupun buruh hanya antara 1 persen dan 3 persen dalam tahun 2012. Tidak seimbang antara kenaikan upah yang diterima dan kenaikan harga kebutuhan dasar tersebut menjadi salah satu penyebab keadaan kemiskinan di Indonesia tak berubah banyak dari waktu-ke waktu.

3. Program Penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks dan multidimensional, mengingat komposisi penduduknya yang beragam status sosial dan ekonomi serta geografis yang tersebar. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia berfokus pada perbaikan kualitas sumberdaya manusia melalui perbaikan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Indonesia telah menyediakan anggaran dana 20 persen dari anggaran pendidikan untuk perbaikan kualitas pendidikan disamping menyediakan layanan dasar kesehatan untuk orang miskin secara cuma-cuma melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Saat ini pemerintah juga menyiapkan perubahan layanan sistem jaminan kesehatan berbasis asuransi yang

mencakup seluruh penduduk sesuai amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, selain itu juga masih banyak program-program lain yang akan dilakukan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Akan tetapi karena kekeliruan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah imbasnya justru telah memporak-porandakan kehidupan perekonomian masyarakat bawah yang selalu saja menjadi objek penderita yang harus menerima segala kegagalan. Sehingga upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan kini tak ubahnya seperti sebuah pertarungan antara hidup dan kematian. Tapi ironisnya rakyat selalu menerima sebuah hasil yang tidak pernah memuaskan dari yang diharapkan.

4. Penyebab kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia dimana pendapatan yang didapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang disebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kurang memiliki ketrampilan yang memadai. Standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beringan.

5. Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global. Berdasarkan pada kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Program penanggulangan kemiskinan harus berkelanjutan, dalam artian setiap pergantian pemerintahan program penanggulangan kemiskinan pemerintahan sebelumnya bukan dihapuskan, melainkan diteruskan.

2. Program pembangunan pemerintah saat ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, program pembangunan ini harus tetap memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaannya harus selalu diawasi dan dievaluasi agar sesuai dengan target yang diharapkan.

3. Program penanggulangan kemiskinan harus yang memberi rangsangan mandiri kepada masyarakat. Bukan program-program yang meninabobokan masyarakat dalam kemalasan.

4. Stabilitas ekonomi sangat berkaitan dengan dunia perpolitikan suatu Negara, maka dari itu politik suatu Negara harus diupayakan berada dalam kondisi yang kondusif agar perekonomian stabil berdampak pada berkurangnya masyarakat miskin.

5. Kemiskinan pun sangat erat dengan minimnya pendidikan dan keterampilan, maka program penanggulangan kemiskinanpun harus memprioritaskan pendidikan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Ed 5, Penerbit: AMP YKPN
- Astika, K.S. (2010). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik "Budaya Kemiskinan di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat"*.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2006*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bappenas. (2002). *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Sebuah Gagasan*. Bappenas. Jakarta.

- Bramantyo, Djohanputro. (2006). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PPM.
- Bank Indonesia. *Tinjauan Kebijakan Moneter: Ekonomi, Moneter, dan Perbankan (TKM)*, Maret 2008:19.
- Cameron, Lisa A. (2000). *Journal of Development Economics. Poverty and Inequality in Java: Examining the Impact of The Changing Age, Educational, and Industrial Structure*. Vol. 62, hlm. 175-176.
- Darwis, V. dan A. R. Nurmanaf. (2001). *Pengentasan Kemiskinan: Upaya yang telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang*. FAE, Volume 19, No. 1, Juli 2001: 55-67
- Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. (2011).
- Mankiw, Gregory. (2006). *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Meier, G.M. (1995). *Leading Issues in Economic Development*. New York:Oxford University Press.
- Multifah. (2011). *Journal of Indonesian Applied Economics*. "Telaah Kritis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Tinjauan Konstitusi". Vol. 5 No. 1 Mei 2011, 1-27.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. (2004). *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Perry Warjiyo. *Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM: Perkembangan dan Strategi ke depan*, dalam <http://www.google.com/25/06/2008>.
- Program Pengentasan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II
- Schrool, J. W. (1981). *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang* Jakarta: PT. Gramedia.
- Stamboel, K. A. (2012). *Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, E. (2008). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparlan, Parsudi. (1993). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Todaro, M.P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Harian Kompas, 30 April 2008 dalam *Porsi Kredit UMKM Membesar bank BUMN Berlomba Pacu Kredit Usaha Rakyat*. Harian Kompas, 23 Maret 2008, dalam "Harga Pangan ditunggu Stabil", Rubrik Bisnis dan Keuangan Harian Kompas, 6 November 2007.
- <http://www.beritakompas.com>
- <http://www.presiden.com> Departemen Keuangan RI, *Data Pokok APBN-P2007 dan APBN-P2008*
- http://www.tkpri.org/penanggulangan_kemiskinan_melalui_UMKM/23-06-2008
- Edi Suharto, *Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, dalam http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm/12-05-2008/09:47

[http://www.google.com/efektifitas
penanggulangan kemiskinan/21-
06-2008.](http://www.google.com/efektifitas%20penanggulangan%20kemiskinan/21-06-2008)

[http://id. wikipedia.](http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan)

[org/wiki/Kemiskinan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan)

[http://bps. go. id/menutab.](http://bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=23)

[php?tabel=1&kat=1&id_subyek=
23](http://bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=23)

[http://penomda. blogspot.](http://penomda.blogspot.com/2010/03/model-pengentasan-kemiskinandi.html)

[com/2010/03/model-
pengentasan-kemiskinandi.html](http://penomda.blogspot.com/2010/03/model-pengentasan-kemiskinandi.html)